

Analisis Kesiapan Usaha Kecil Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm) Di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro

Kurota Ayunin¹, M. Hudi Setyobakti², Wahyuning Murniati³

STIE Widya Gama Lumajang

Email: kurotayunin85@gmail.com¹ hudisetyobakti@gmail.com² wahyuning123@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Volume 4

Nomor 1

Bulan September

Tahun 2021

Halaman 13-21

ABSTRAK

UMKM merupakan salah satu sumber perekonomian Indonesia, namun dalam perkembangannya UMKM memiliki beberapa kendala. Salah satu kendalanya yaitu laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. DSAK IAI telah menerbitkan SAK ETAP sebagai pedoman laporan keuangan UMKM, namun banyak penelitian tentang penerapan SAK ETAP pada UMKM memberikan hasil bahwa UMKM masih belum menerapkan SAK ETAP. Hal tersebut dikarenakan SAK ETAP yang lengkap dan rumit. Sehingga, DSAK IAI menerbitkan SAK EMKM pada tanggal 8 Desember 2016, dengan tujuan untuk membantu UMKM dalam hal pemenuhan kebutuhan pelaporan keuangannya, dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan usaha kecil dalam implementasi SAK EMKM di Kecamatan Candipuro. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan kuisioner sebagai data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha kecil di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro rata-rata sudah siap untuk menerapkan SAK EMKM dalam usahanya. Kesiapan tersebut dilihat dari beberapa pernyataan tentang laporan keuangan dan pengetahuan tentang SAK EMKM. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya untuk memberikan sosialisasi tentang SAK EMKM. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan agar UMKM mempersiapkan SDM dan pengetahuan tentang penerapan SAK EMKM.

Kata Kunci : kesiapan, UMKM, dan SAK EMKM.

ABSTRACT

UMKM is one of the sources of the Indonesian economy, but in its development UMKM has several obstacles. One obstacle is the financial statements that are not in accordance with accounting standards in Indonesia. DSAK IAI has issued SAK ETAP as a guide to UMKM financial reports, but many studies on the application of SAK ETAP to UMKM have given results that UMKM have not implemented SAK ETAP. That is because SAK ETAP is complete and complex. Thus, DSAK IAI issued SAK EMKM on December 8, 2016, with the aim of assisting UMKM in meeting their financial reporting needs, and was effective on January 1, 2018. Therefore, this study aims to analyze the readiness of small businesses in implementing SAK EMKM in Candipuro District. This research uses descriptive quantitative method by distributing information as primary data. The results of this study indicate that small businesses in the village of Sumberejo, Candipuro District are, on average, ready to implement SAK EMKM in their businesses. This readiness is seen from a number of statements about financial statements and knowledge about SAK EMKM. This research is expected to contribute to the next reader or researcher to disseminate information about SAK EMKM. In addition, this study recommends that MSMEs prepare human resources and knowledge about the application of SAK EMKM.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu, kini persaingan di dunia industri semakin pesat dengan adanya program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menuntut para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Indonesia, sebagai negara berkembang, pada tahun 2020 akan memasuki pasar bebas dengan 21 negara lainnya di kawasan Asia Pasifik, (Wardhani, 2006). Hal tersebut bukanlah hal yang mudah bagi sebagian pelaku usaha di Indonesia. Peningkatan kualitas dan kapasitas dari pelaku usaha merupakan salah satu solusi untuk menghadapi pasar bebas yang ada di depan mata. Hal ini dimulai dengan melakukan berbagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Dewi & Sari, 2019).

UMKM telah memberikan kontribusi yang begitu penting dan sangat besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia, selain itu UMKM memiliki kelebihan yaitu mampu bertahan dalam menghadapi kondisi krisis dengan tetap bertahan dari guncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan krisis global 2008, (Sulisti, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menetapkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam pasal 48, pemegang Izin Usaha wajib menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha, mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha, menyusun pembukuan dari kegiatan usaha dan melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha diterbitkan, (Dewi dan Sari 2019). Namun pada praktiknya banyak pelaku usaha yang masih belum sadar dan mau menerapkan hal tersebut.

Faktor yang menjadi kendala UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM adalah kesadaran akan pentingnya laporan keuangan belum dimiliki oleh pelaku UMKM, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang SAK EMKM serta pengetahuan tentang SAK EMKM yang dimiliki masih minim, (Sholikin dan Setiawan, 2018). Pengetahuan pelaku usaha menengah tentang SAK EMKM dilihat dari kemampuan pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai unsur dan struktur laporan keuangan yang berlaku sesuai SAK EMKM. Sedangkan kesiapan usaha menengah merupakan keadaan dimana pelaku usaha telah mampu untuk mengimplementasikan sebuah standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya dengan pengetahuan yang dimilikinya.

DSAK-IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tanggal 8 Desember 2016, yang bertepatan dengan ulang tahun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang ke-59. Dimana waktu itu wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan yang sama ketua dewan pengurus nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Mardiasno mengungkapkan bahwa “ SAK EMKM diterbitkan untuk membantu meningkatkan akuntabilitas UMKM dan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel”. Hal itu sesuai dengan tujuan Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM yakni untuk menumbuhkan serta mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. SAK EMKM ini dilakukan secara efektif per 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia agar memperoleh akses yang semakin luas untuk permodalan serta diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, (Sulisti, 2019).

Terdapat beberapa kekhususan standar dalam SAK EMKM, yaitu komponen laporan keuangan EMKM hanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan hanya dengan basis biaya historis, tidak adanya pengakuan pengukuran nilai keciali untuk entitas bidang jasa keuangan yang mengikuti ketentuan regulator terkait, aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun tanpa memperhitungkan nilai residu, laporan komparatif cukup disajikan hanya dengan 1 periode sebelumnya, dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi diperlukan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan, entitas yang menyusun laporan keuangan dengan menggunakan asumsi dasar kas mengubah laporan keuangan tersebut menjadi akrual dengan melakukan penyesuaian pada akhir periode laporan dan sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2019) menunjukkan hasil analisis bahwa sudah hampir seluruh pelaku usaha menengah mengetahui tentang dasar akuntansi serta aturan mengenai SAK EMKM sehingga telah siap dan mampu dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019) hasil penelitian menunjukkan pada 3 UMKM pengrajin mebel yaitu UD DJ, UD Abadi Jaya Mebel, dan Mebel Morodadi ditemukan bahwa ketiga UMKM tersebut belum siap menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangan mereka. Hal tersebut dikarenakan ketiga UMKM itu masih belum mengetahui dan memahami tentang SAK EMKM, belum pernah membuat laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan,

tidak ada pegawai khusus untuk menyelenggarakan pembukuan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ismadewi, Herawati, dan Atmaja 2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) proses penyusunan laporan keuangan usaha Ayam Boiler I Wayan Sudiarsa hanya menyusun catatan keuangan secara sederhana, (2) kendala yang dihadapi oleh usaha Ayam Boiler I Wayan Sudiarsa dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yaitu; (a) faktor SDM (sumber daya manusia), (b) tingkat kompetensi, dan (c) lingkup organisasi yang kecil, (3) penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM pada usaha Ayam Boiler I Wayan Sudiarsa terdiri dari; (a) Laporan laba rugi, (b) laporan posisi keuangan, dan (c) catatan atas laporan keuangan.

Usaha kecil saat ini di Kabupaten Lumajang semakin meningkat, hal tersebut beriringan dengan semakin meningkatnya sektor pariwisata. Masyarakat kini memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dari usaha kecil perlu adanya kesiapan dari para pelaku usaha terkait dalam penerapannya. Karena beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut masih belum diterapkan sepenuhnya, bahkan sebagian usaha kecil ini sama sekali tidak menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan, apalagi pelaku usaha kecil yang bertempat di desa Sumberejo Kecamatan Candipuro. Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro saat ini telah memiliki sektor pariwisata yang bisa dikatakan berkembang sehingga menarik wisatawan lokal, hal tersebut sangat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan membuat usaha kecil. Namun masih banyak yang perlu diperhatikan karena minimnya modal dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) menyebabkan usaha kecil di wilayah tersebut tidak memiliki usia usaha yang cukup lama. Hal tersebut tidak terlepas dari catatan hasil operasionalnya yakni laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif, dengan populasi penelitiannya adalah usaha kecil di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro. Jenis data yang digunakan yaitu data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, teknik penelitian yang digunakan yaitu teknik purposive sampling dengan kriteria: usaha kecil yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang khususnya Kecamatan Candipuro, usaha kecil yang bukan berada di Desa Sumberejo, usaha kecil yang memiliki umur usaha ≥ 1 tahun dan masih beroperasi hingga saat ini. Metode pengumpulan data adalah kuesioner atau angket.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Uji validitas dan Uji Realibilitas adalah sebagai berikut pengujian validitas dilakukan dengan memakai metode analisa faktor pada software SPSS. Dasar pengambilan keputusan sebagai bahan acuan atau pedoman dalam uji validitas dengan prinsip product moment pearson correlation adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan nilai r hitung dengan nilai rtabel
 - a. Jika nilai r hitung $>$ rtabel, maka artinya ada korelasi antar variabel yang dihubungkan.
 - b. Jika nilai r hitung $<$ rtabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel yang dihubungkan.
2. Membandingkan nilai Signifikansi (Sig.) dengan nilai Alpha 0,05 atau 5%
 - a. Jika nilai Signifikansi (Sig.) $<$ 0,05, maka artinya ada korelasi antar variabel yang dihubungkan.
 - b. Jika nilai Signifikansi (Sig.) $>$ 0,05, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel yang dihubungkan.

Kedua teori dasar tersebut dalam pengambilan keputusan di atas akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Berdasarkan rtabel maka nilai yang digunakan dalam penelitian untuk uji validitas adalah jika jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 49 responden (n) maka $df = n - 2$ atau $df = 49 - 2 = 47$. Tingkat Signifikansi dalam penelitian adalah 0,05 jadi $df = 47$ dan Sig. 0,05 dengan Signifikansi untuk uji dua arah karena pada penilitan ini masih belum memiliki arah apakah analisis kesiapan usaha kecil dalam implementasi SAK EMKM ini sudah siap apa tidak siap, sehingga rtabel yang digunakan sebesar 0,281. Berikut ada rekapitulasi hasil dari uji validitas:

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

No		R hitung	R tabel	Hasil
1	Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan menengah (SAK EMKM)	0,766	0,281	Valid
		0,886	0,281	Valid
		0,893	0,281	Valid
		0,876	0,281	Valid
		0,828	0,281	Valid
2	Sistem Pencatatan	0,541	0,281	Valid
		0,572	0,281	Valid
		0,431	0,281	Valid

		0,669	0,281	Valid
		0,78	0,281	Valid
3	Konsep Entitas Bisnis	0,701	0,281	Valid
		0,849	0,281	Valid
		0,816	0,281	Valid
		0,731	0,281	Valid
		0,434	0,281	Valid
4	Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)	0,74	0,281	Valid
		0,61	0,281	Valid
		0,843	0,281	Valid
		0,84	0,281	Valid
		0,683	0,281	Valid

Sumber : Data diolah SPSS

Dari hasil uji validitas di atas dapat dikatakan bahwa pernyataan yang terdapat pada kuesioner valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka artinya ada korelasi antar variabel yang dihubungkan atau valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

	Cronbach's Alpha	N of Item
X1 (Penerbitan Standar Akuntansi KEuangan Entitas Mikri, Kecil dan menengah (SAK EMKM)	,094	5
X2 (Sistem Pencatatan)	,873	11
X3 (Konsep Entitas bisnis)	,674	4
X4 (Ketersediaan SDM)	,798	5

Sumber : Data diolah SPSS

Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur analisis kesiapan usaha kecil dalam implementasi SAK EMKM di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro cukup reliabel.

Tabel 3 Data Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std.Deviaton	Variance
x1.1	49	4	1	5	172	3,51	0,938	0,880
x1.2	49	4	1	5	177	3,61	0,975	0,951
x1.3	49	4	1	5	168	3,43	1,061	1,125
x1.4	49	4	1	5	175	3,57	1,080	1,167
x1.5	49	4	1	5	163	3,33	0,944	0,891
x2.1	49	4	1	5	202	4,12	0,904	0,818
x2.2	49	4	1	5	169	3,45	0,914	0,836
x2.3	49	3	2	5	189	3,86	0,677	0,458
x2.4	49	4	1	5	171	3,49	0,893	0,797
x2.5	49	4	1	5	165	3,37	0,994	0,987
x2.6	49	4	1	5	205	4,18	0,993	0,986
x3.1	49	4	1	5	215	4,39	0,996	0,992
x3.2	49	4	1	5	204	4,16	0,874	0,746
x3.3	49	3	2	5	188	3,84	0,746	0,556
x3.4	49	4	1	5	156	3,18	0,834	0,695
x4.1	49	4	1	5	192	3,92	0,812	0,660
x4.2	49	4	1	5	188	3,84	0,921	0,848
x4.3	49	4	1	5	189	3,86	1,000	1,000
x4.4	49	4	1	5	205	4,18	0,972	0,945
x4.5	49	3	2	5	216	4,41	0,734	0,538
Valid N	49							

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel di atas, pernyataan pertama (x1.1) adalah Pelaku usaha mengetahui tentang penerbitan SAK EMKM. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah 3,51 kali dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan terendah 1 yang berarti „sangat tidak setuju“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil memiliki tingkat kesiapan yang cukup tinggi untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Meskipun usaha kecil di Kecamatan Candipuro masih minim pemahaman tentang laporan keuangan, karena tidak adanya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dari pemerintah kepada usaha kecil tentang SAK EMKM. Penelitian tersebut sesuai dengan Kusuma dan Lutfiany (2018) bahwa besarnya kontribusi pengaruh sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pelaku usaha, persepsi pelaku usaha serta pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM yakni sebesar 57,5% dimana pemahaman akuntansi ini merupakan variabel yang paling dominan terhadap implementasi SAK EMKM. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikin dan Setiawan (2018), pada penelitian itu menunjukkan bahwa Rumah Mode een Productions dan Kanaya Konveksi dinilai tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala kesiapan UMKM tersebut.

Pernyataan kedua (x1.2) adalah Pelaku usaha mengetahui pentingnya SAK EMKM. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah 3,61 kali dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah adalah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil sudah siap untuk mengetahui pentingnya SAK EMKM dalam membuat laporan keuangan dan keputusan akuntansi, dll. Hal tersebut memang seharusnya diketahui oleh usaha kecil untuk menunjang aktivitas akuntansinya. Setidaknya terdapat 3 laporan keuangan menurut SAK EMKM yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang berisikan catatan atau rincian. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Sari (2019) yang menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tingkat kesiapan yang cukup tinggi dalam menyusun laporan keuangan atas usaha yang dijalankannya sesuai dengan SAK EMKM yang telah ditetapkan.

Pernyataan ketiga (x1.3) adalah mengenai pelaku usaha mengetahui visi, misi dan tujuan SAK EMKM. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,43 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk mengetahui visi, misi dan tujuan dari SAK EMKM. Karena tujuan dari SAK EMKM itu adalah sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berisi informasi posisi dan kinerja keuangan. Meskipun hal tersebut terbilang sepele, tetapi akan baiknya jika pelaku usaha kecil juga mengetahui visi, misi dan tujuan dari SAK EMKM agar tidak terjadi kesalahpahaman akan tujuan. Dimana tantangan terbesar bagi UMKM yaitu pengelolaan keuangan yang efektif baik menjalankan organisasi serta untuk kegiatan ekspansi dalam pertimbangan persaingan global, (Sulisti, 2019).

Pernyataan keempat (x1.4) adalah pelaku usaha mempersiapkan usahanya dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah 3,57 kali dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap mempersiapkan usahanya dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Dalam menunjang aktivitas akuntansi memang seharusnya usaha kecil sudah mempersiapkan usahanya, apalagi dalam situasi seperti saat ini, memudahkan pelaku usaha mengevaluasi maupun mendapatkan keputusan dengan tepat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sulisti (2019) yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memahami akuntansi dasar, namun kurang dalam memahami SAK EMKM. Karena SAK EMKM itu baru dibelkaskan dan sosialisasinya masih belum menyeluruh, namun jika dilihat dari indikator persepsi dan fasilitas pendukung pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung cukup siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Pernyataan kelima (x1.5) adalah pelaku usaha sudah mengimplementasikan SAK EMKM dalam pencatatan akuntansi. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,33 kali dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „tidak siap“. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM dalam pencatatan akuntansi. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Salmiah et al. (2015) yang menyatakan bahwa UMKM di Kota Pekanbaru telah secara lengkap melakukan proses akuntansi sesuai dengan aturan dan tahapan dalam siklus akuntansi sesuai SAK EMKM. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sholikin dan Setiawan (2018) mendapatkan temuan di luar konteks yang diteliti bahwasanya jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesiapan implementasi SAK EMKM, meskipun jenjang pendidikan tinggi tetapi tanpa adanya sosialisasi, pelatihan dan pendampinga maka SDM tidak akan memahami tentang penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan keenam (x2.1) adalah pelaku usaha melakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,12 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap melakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Rahmawati dan Puspasari (2016) yang menyatakan bahwa pengusaha UMKM menganggap bahwa pembukuan transaksi penting untuk perkembangan usaha mereka dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kegiatan UMKM. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, Nurhayaty, & Miharja (2019) yaitu pelaku usaha beranggapan bahwa hanya dengan mengumpulkan bukti transaksi dan pencatatan transaksi yang terjadi mereka sudah dapat menentukan laba, tanpa perlu membuat laporan keuangan, karena menurut para pelaku usaha membuat laporan keuangan memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama.

Pernyataan ketujuh (x2.2) adalah pelaku usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yaitu berbasis akrual atau pendapatan dan biaya di akui pada saat terjadinya transaksi. Hasil analisis data menunjukkan jawaban responden adalah sebesar 3,45 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yaitu berbasis akrual atau pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pencatatan menggunakan basis akrual akan lebih akurat. IAI juga pernah menjelaskan di dalam SAK EMKM bahwa banyak riset yang menemukan sebagaimana UMKM masih belum dapat menerapkan SAK ETAP dengan tepat, karena SAK ETAP dianggap kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan UMKM. Riset-riset tersebut memberikan rekomendasi untuk penyusunan suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana untuk UMKM. Kerangka pelaporan keuangan SAK EMKM diharapkan membantu dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan dengan standar akrual.

Pernyataan kedelapan (x2.3) adalah pelaku usaha melakukan pencatatan menggunakan manual (tanpa sistem pencatatan/aplikasi). Hasil analisis menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,86 dengan klasifikasi kurang siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 2 yang berarti „tidak setuju“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk melakukan pencatatan menggunakan manual (tanpa sistem pencatatan/aplikasi). Hal tersebut terjadi karena pelaku usaha kecil yang memiliki usia di atas 40 Tahun kurang memahami sistem pencatatan dengan aplikasi, sehingga diperlukan pelatihan atau sumber daya manusia yang mumpuni. Penelitian ini sesuai dengan Rifani & Aini (2016), yaitu pemilik tidak mengetahui perkembangan usahanya, pemilik hanya mengukur kemampuan usahanya dari modal yang terkumpul lagi dari hasil penjualan sebelumnya. Perancangan sistem informasi akuntansi usaha kecil dapat memberikan informasi tentang penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, persediaan, harga pokok penjualan dan laba kotor untuk setiap periode.

Pernyataan kesembilan (x2.4) adalah pelaku usaha melakukan pencatatan menggunakan sistem/aplikasi. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,49 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk melakukan pencatatan menggunakan sistem/aplikasi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2019) yang menunjukkan bahwa kesiapan pelaku usaha menengah dalam penggunaan software akuntansi dalam proses pencatatan akuntansi masih rendah yang diakibatkan dari sulitnya penggunaan aplikasi dan kendalanya waktu dalam menggunakan aplikasi tersebut. Jika kita ketahui bahwa banyak keuntungan yang didapatkan jika melakukan pencatatan menggunakan sistem/aplikasi yakni mudah digunakan, menghemat biaya dan waktu, meningkatkan akurasi, dan mempermudah pengambilan keputusan.

Pernyataan kesepuluh (x2.5) adalah pelaku usaha mengetahui serta menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,37 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap dan siap untuk mengetahui serta menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Siyami (2014) yang menunjukkan hasil bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo tidak menggunakan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan operasionalnya. Namun, perancangan sistem informasi akuntansi usaha kecil dapat memberikan informasi tentang penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, persediaan, harga pokok penjualan dan laba kotor untuk setiap periode, sehingga akan mempermudah pelaku usaha.

Pernyataan kesebelas (x3.1) adalah pelaku usaha menyimpan bukti faktur dari setiap terjadinya transaksi. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,18 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil setuju untuk menyimpan bukti faktur dari setiap terjadinya transaksi. Hal tersebut memang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk mengetahui asal sejumlah uang yang ada di laporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Dewi dan Sari (2019) yang menyatakan bahwa setiap transaksi yang terjadi di dalam usahanya, pelaku usaha telah menyimpan bukti transaksi tersebut untuk dilakukan pencatatan pada jurnal.

Pernyataan kedua belas (x3.2) adalah pelaku usaha memisahkan antara modal usaha dengan uang pribadi. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,39 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk memisahkan antara modal usaha dengan uang pribadi. Dampak apabila tidak dipisahkan antara modal dan uang pribadi adalah tidak bisa melakukan pembukuan dengan benar karena tidak ada alur yang jelas mengenai ke mana uang masuk atau keluar. Sehingga mempersulit pelaku usaha untuk mempertimbangkan apakah usahanya mendapat keuntungan atau kerugian. Sehingga sangat perlu diadakannya sosialisasi bagi pelaku usaha tentang pelatihan pencatatan, agar pelaku usaha tersebut mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usahanya.

Pernyataan ketiga belas (x3.3) pelaku usaha memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi baik kekayaan maupun kewajiban usaha dengan pemilik usaha. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,16 dengan klasifikasi kurang siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 2 yang berarti „tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil kurang siap untuk memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi baik kekayaan maupun kewajiban usaha dengan pemilik usaha. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Sembiring & Elisabeth (2018), yaitu menjelaskan bahwa hasil penelitiannya menyebutkan bahwa 10 UMKM (27.8%) dalam keuangan membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan usaha, dan 26 UMKM (72.2%) tidak membedakan dengan alasan tidak perlu ada semua yang di miliki adalah harta pribadi dan alasan lain semua kepentingan dianggap sama. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian pelaku UMKM tidak menerapkan konsep entitas bisnis dalam usahanya.

Pernyataan keempat belas (x3.4) adalah pelaku usaha memiliki struktur organisasi yang jelas. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,84 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk memiliki struktur organisasi yang jelas. Hal tersebut untuk memudahkan pembagian tugas yang lebih jelas, dan lebih efektif dalam kegiatan operasionalnya. Tantangan terbesar bagi UMKM adalah pengelolaan keuangan yang efektif baik untuk menjalankan organisasi serta untuk kegiatan ekspansi dalam pertimbangan persaingan global (Sulisti, 2019).

Pernyataan kelima belas (x3.5) adalah pelaku usaha hanya mencatat aktivitas bisnis saja dan tidak mencatat aktivitas-aktivitas personal, property, dan utang usaha. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,18 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk mencatat aktivitas bisnis saja dan tidak mencatat aktivitas-aktivitas personal, property, dan utang usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salmiah et al. (2015) yang menyatakan bahwa UMKM di Kota Pekanbaru telah secara lengkap melakukan proses akuntansi sesuai dengan aturan dan tahapan dalam siklus akuntansi sesuai SAK.

Pernyataan keenambelas (x4.1) adalah pelaku usaha melakukan pemantauan atas perkembangan usahanya dalam waktu tertentu. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,92 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk melakukan pemantauan atas perkembangan usahanya dalam waktu tertentu. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi dan Sari (2019) yang menunjukkan bahwa tingkat kesiapan adanya *monitoring* pada perkembangan usaha telah terjadi peningkatan sehingga pelaku usaha telah mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Pernyataan ketujuh belas (x4.2) adalah pelaku usaha memiliki pendidikan yang cukup. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,84 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk memiliki pendidikan yang cukup. Meskipun masih ada beberapa pelaku usaha yang menganggap tidak terlalu mementingkan pendidikan, akan tetapi hal tersebut telah menunjukkan hasil bahwasanya pelaku usaha yang cukup memiliki pendidikan akan lebih mudah dalam segala aspek (pencatatan dan pelaporan).

Pernyataan kedelapanbelas (x4.3) adalah pelaku usaha melakukan perekrutan tenaga kerja yang ahli dibidangnya. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,86 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang ahli dibidangnya. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian Faturokhman et al. (2015) yang menyatakan bahwa kurangnya keterampilan dalam akuntansi, sehingga diperlukan tenaga ahli dalam melakukan proses akuntansi.

Pernyataan kesembilanbelas (x4.4) adalah pelaku usaha memberikan pelatihan kepada karyawan dalam masing-masing bidang. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,18 dengan klasifikasi siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 1 yang berarti „sangat tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil siap untuk memberikan pelatihan kepada karyawan dalam masing-masing bidang, dengan tujuan agar lebih memudahkan operasionalnya. Pelatihan ini dapat dilakukan sendiri oleh pelaku usaha jika pelaku usaha telah memahami sepenuhnya tentang SAK EMKM, jika belum memahami bisa meminta bantuan kepada pihak yang terkait atau pemerintah, dengan tujuan agar meningkatnya sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Pernyataan keduapuluh (x4.5) adalah pelaku usaha memerlukan pengelolaan dan pengembangan usaha yang baik untuk mencapai tujuan. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,41 dengan klasifikasi kurang siap dengan skor tertinggi 5 yang berarti „sangat siap“ dan skor terendah 2 yang berarti „tidak siap“. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil kurang siap untuk memerlukan pengelolaan dan pengembangan usaha yang baik untuk mencapai tujuan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan promosi, kenali pesaing, memperluas jaringan, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), mengutamakan pelayanan konsumen, melakukan inovasi produk, meminimalisasi biaya operasional, serta mengatur keuangan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini serta berdasarkan data dan informasi yang telah didapat maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha kecil di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro sebanyak 85% dinyatakan siap dan 15% dinyatakan kurang siap dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Dengan melakukan proses akuntansi secara sistematis maka laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat memberikan informasi yang tepat bagi pengambilan keputusan para penggunanya.

Dari penelitian yang dilakukan ini, adapun saran yang dapat disampaikan kepada beberapa pihak setelah dilakukannya penelitian ini adalah peneliti mengharapkan adanya sosialisasi mengenai SAK EMKM secara berkesinambungan demi meningkatkan dan menjaga kualitas laporan keuangan UMKM di Kecamatan Candipuro terutama Desa Sumberejo, walaupun hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang positif (siap), tidak menutup kemungkinan saran untuk pelaku usaha kecil di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro. Diharapkan pelaku usaha kecil mulai mencoba menggunakan akuntansi digital berbasis SAK EMKM untuk membantu pencatatan keuangannya. Hal ini terkait dengan pernyataan kesembilan (X2.4) mengenai adalah pelaku usaha melakukan pencatatan wajib menggunakan sistem/aplikasi dan pernyataan kesepuluh (X2.5) mengenai pelaku usaha mengetahui serta menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada usaha kecil saja yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro. Diharapkan untuk kedepannya penelitian ini bisa dikembangkan lagi dengan memperluas cakupannya populasinya. Sehingga populasi yang diambil adalah usaha mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan konsep dari SAK EMKM. Besar harapan peneliti kedepannya keterbatasan pada penelitian ini mampu dilengkapai oleh penelitian-penelitian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, P. R., & Dura, J. (n.d.). *Implementasi Pencatatan Keuangan Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Sentra Industri Kripik Tempe Sanan di Kota Malang)*. 59–65. Andriani, L., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (sebuah studi intrepetatif pada peggy salon) Jurusan Akuntansi Program S1. *E-Journal S1 Ak. Universitas Pendidikan Ganेशha, 1*.
- Blora, K., & Surakarta, I. (2019). *Journal of Islamic Finance and Accounting*. March. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1441>
- Danna Solihin, I. N. E., Andi I. (2018). Implementasi SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah) Pada Umkm Borneo Food Truck Samarinda Community. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 2(2), 176. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v2i2.3707>

- Dewi, L., G. K., & Sari, L., G., J., M. (2019). *Analisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan EMKM*. Jurnal Imliah Akuntansi. Vol. 4, No. 2, Hal: 141-160.
- Fatimah, A. N. (2017). *Analisis Kesiapan Lima Usaha Kecil dalam Implementasi SAK EMKM di Kabupaten Purworejo*.
- Faturokhman, A., Puspasari, N., Pinasti, m., & Sri Rejeki, K. (2015). *Universuty's One Stop Accounting Service untuk UKM: Solusi Mengatasi Keengganan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*.
- I.C. Kusuma, V. Lutfiany. (2018). *Persepsi UMKM Dalam Memahami SAK EMKM*. ISSN 2442-3033 Volume 4 Nomor 2
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Ismadewi, N. K., Herawati, N. T., & Atmaja, A. T. (2017). *Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Ternak Ayam Boiler (Study Kasus Pada Usaha I Wayan Sudiarsa Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan)*. *E- Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Jusup, Alharyono.(2011). *Dasar-dasar Akuntansi Edisi tujuh*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kalangi, L., Sondakh, J., & Pratiwi, A. (2014). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan Pt. Nichindo Manado Suisan*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 254–265.
- Kasus, S., Buleleng, K., Gede, L., Dewi, K., Gede, L., & Mekar, J. (2019). *Analisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan EMKM*. 4(2), 141–160.
- Menengah, D. A. N. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. September.
- Narsa, I. M., & Widodo, A. (2012). *Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP)*. 3, 204–214.
- Priyatno, Duwi. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFEST.
- Rahmawati, T., & Puspasari, O. R.(2016). *Mengungkap Kesiapan Implementasi SAK ETAP dalam Menyajikan Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Kuningan*. *SnaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 532-539.
- Rifani, L., Aini, N., Komputer, F. I., & Surabaya, U. N. (2016). *Aplikasi sistem informasi akuntansi pada usaha kecil menengah kampung kue rungkut surabaya*.
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Andino, I.(2015). *Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru)*. *Akuntansi Dewantara*, 1(2).
- Siyami, N. (2014). *Analisis Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah di Purworejo*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M., & Yusuf, F.A. (2017). *Perekonomian Indonesia edisi 2*. Bogor: In Media.
- Wardhani, B. L. S. W. (2006). *Apec 2020 bagi indonesia: mitra atau pemangsa?* *Jurnal Ilmu Internasional*. 19(4),pp: 49-58.